

## SURVEI POTENSI PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN PLTN MURIA

Yarianto SBS., Sri Hariani S., Heni Susiati, Imam Hamzah, Fepriadi<sup>1)</sup>

### ABSTRAK

**SURVEI POTENSI PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN PLTN MURIA.** Salah satu kelayakan program pembangunan PLTN adalah kelayakan sosial budaya. Semakin terbukanya masyarakat dalam kerangka negara demokrasi telah membawa perubahan dalam paradigma pembangunan. Masyarakat menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan setiap proyek di daerahnya. Bahkan faktor sosial-budaya seperti "*social riot*" dapat menjadi "*exclusion factor*" seperti yang terjadi pada PT Inti Indorayon beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu faktor sosial budaya harus mendapat pertimbangan yang matang dalam perencanaan pembangunan PLTN. Salah satunya adalah membuat peta potensi partisipasi masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei yang dipandu dengan kuesioner, tanpa memberi perlakuan apapun pada obyek yang diteliti (ekspose fakto). Selain itu juga dilakukan pendekatan kualitatif dengan "*indepth interview*" untuk menggali informasi secara mendalam. Sampel yang diambil adalah masyarakat umum di sekitar tapak PLTN, sampai radius 10 km. Teknik sampling yang digunakan adalah acak sempurna. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di sekitar tapak cukup berpotensi untuk berpartisipasi menghadapi pembangunan PLTN. Suasana yang cukup kondusif ini perlu dibina secara terus menerus agar tidak kehilangan momen, dengan melakukan *social setting*.

### ABSTRACT

**SURVEY OF PUBLIC PARTICIPATION POTENTIAL REGARDING THE MURIA NPP PROGRAM.** Socio-culture aspect is a part of site feasibility evaluation of Nuclear Power Plant (NPP) program. Indonesia is undergoing democratization, therefore the paradigm of development has also been changed where the people have freedom or liberty and they can express their opinion independently. The people are significant factor that involving in the decision making of regional development. Even the socio-culture, such as social riot, can reject the site. Therefore socio-culture aspect should be considered in the NPP site evaluation. The first step of the study, mapping of public participation potential should be conducted by field survey. The method used in the research is quantitative approach with field survey guided by questioner without any treatment of object sampled. Qualitative approach was also conducted by indepth interview technique to collect more detailed information. Information were collected from general public without any stratification in the 10 km radius from NPP site. Sampling method used was full random sampling technique. The results of survey show that the most of the people have significant potential for participating in the NPP Program. Conducive atmosphere should be maintained by social setting, therefore the present good momentum will not be lost.

---

<sup>1)</sup> Staf Bidang Penerapan Sistem Energi – P2EN

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Program pembangunan PLTN merupakan salah satu jawaban untuk mengatasi kebutuhan listrik nasional, yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam kerangka pemenuhan kebutuhan tersebut, program pembangunan PLTN telah disiapkan dalam waktu yang cukup panjang, dengan mempertimbangkan semua aspek teknologi, tapak, lingkungan, ekonomi, keselamatan, sosial dan budaya. Berdasarkan hasil studi tapak dan lingkungan yang dilakukan oleh konsultan asing (Newjtec-Jepang) telah terpilih calon terbaik yaitu Ujung Lamahabang, yang terletak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Agar program PLTN dapat berjalan sesuai rencana, maka tapak PLTN harus terbebas dari *exclusion factor* (faktor penolak) yaitu faktor yang tidak memungkinkan dibangunnya PLTN di daerah tersebut. Pada masa reformasi ini, dimana demokrasi menjadi salah satu pilarnya, telah menyebabkan perubahan peta sosial, budaya, dan politik secara nasional. Hal inipun berlaku juga untuk masyarakat di Jepara. Masyarakat merupakan subyek yang harus diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan proyek-proyek penting dan vital.

Adanya kebebasan berekspresi dari masyarakat yang diwujudkan baik melalui jalur politik maupun non politik, dapat mempengaruhi setiap pengambilan keputusan penting. Bahkan jika program PLTN tidak didesain secara matang yang mengakomodasi kebutuhan sosial, dapat menjadi ganjalan program tersebut bahkan bisa bergeser menjadi faktor penolak.

Pada jaman Orde Baru berkuasa, semua keputusan diambil oleh pemerintah, dan rakyat hanya menerima akibat (baik positif maupun negatif) atau hanya sebagai obyek pembangunan, tidak mempunyai suara yang cukup kuat dalam pengambilan keputusan. Pembangunan lebih bersifat top down.

Setelah reformasi bergulir, lambat laun terjadi perubahan pola pikir masyarakat. Pada masa peralihan kekuasaan, terjadi euforia kebebasan, sehingga lebih banyak ekspresi masyarakat yang bersifat negatif, seperti penjarahan hutan, demonstrasi/unjuk rasa, tindak kekerasan, pemerasan dan lain-lain dengan argumen menyontoh dari perilaku pejabat. Pada awal reformasi, pernah dilakukan survei persepsi masyarakat tentang PLTN dengan melakukan *interview* dengan responden masyarakat di sekitar tapak PLTN. Hal yang paling menonjol adalah responden lebih ekspresif dalam mengemukakan pendapatnya tentang PLTN. Mereka tidak takut lagi untuk mengatakan "tidak", termasuk bagi penentang program PLTN. Namun situasi politik yang belum stabil ini mempengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga persepsi masyarakatpun bersifat

dinamis sekali. Oleh karena itu diperlukan komunikasi yang terus menerus untuk menggali informasi masyarakat mengenai program PLTN.

Dengan bergulirnya reformasi, maka program pemerintah harus selaras dengan kehendak dan keinginan masyarakat (baca: memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat). Penelitian yang dilakukan pada tahun anggaran 2003 ini lebih difokuskan untuk menggali informasi mengenai persepsi dan potensi partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program PLTN. Penelitian dilakukan dengan wawancara (kuesioner dan indepth interview) kepada masyarakat di sekitar tapak PLTN (dalam radius 50 km). Masyarakat pada ring ini adalah yang terkena *dampak langsung* dari proyek PLTN, yang sangat rentan terhadap segala perubahan yang diakibatkan oleh proyek pembangunan PLTN.

### **I.2. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menggali informasi sosial terkini di sekitar tapak PLTN dalam radius 10 km dari tapak PLTN Ujung Lemahabang
2. Mengkaji tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat dalam radius 10 km dari tapak PLTN Ujung Lemahabang terhadap proyek pembangunan PLTN
3. Mengkaji potensi partisipasi aktif masyarakat dalam radius 10 km dari tapak PLTN Ujung Lemahabang dalam rangka mensukseskan program pembangunan PLTN

### **I.3. Lingkup Pekerjaan**

1. Melakukan pengumpulan pendapat masyarakat secara umum mengenai profil responden, kebutuhan listrik, persepsi masyarakat, potensi partisipasi masyarakat terhadap program PLTN di sekitar tapak PLTN ULA (dalam radius 10 km)
2. Memberikan informasi umum mengenai pendapat dan perilaku sosial untuk masukan program PLTN
3. Responden hanya dibatasi pada grass root (masyarakat awam)

## **II. METODE PENELITIAN**

### **II.1. Jenis, Sifat, dan Teknik Penelitian**

Penelitian ini bersifat eksploratif, dimana informasi dan data digali / dikumpulkan di lapangan dari obyek yang diteliti tanpa memberikan perlakuan sama sekali pada obyek yang diteliti.

Penelitian potensi partisipasi masyarakat terhadap program PLTN dilaksanakan dengan metode survei, yaitu suatu cara meneliti status kelompok manusia, obyek, keadaan, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas, peristiwa pada waktu sekarang tanpa

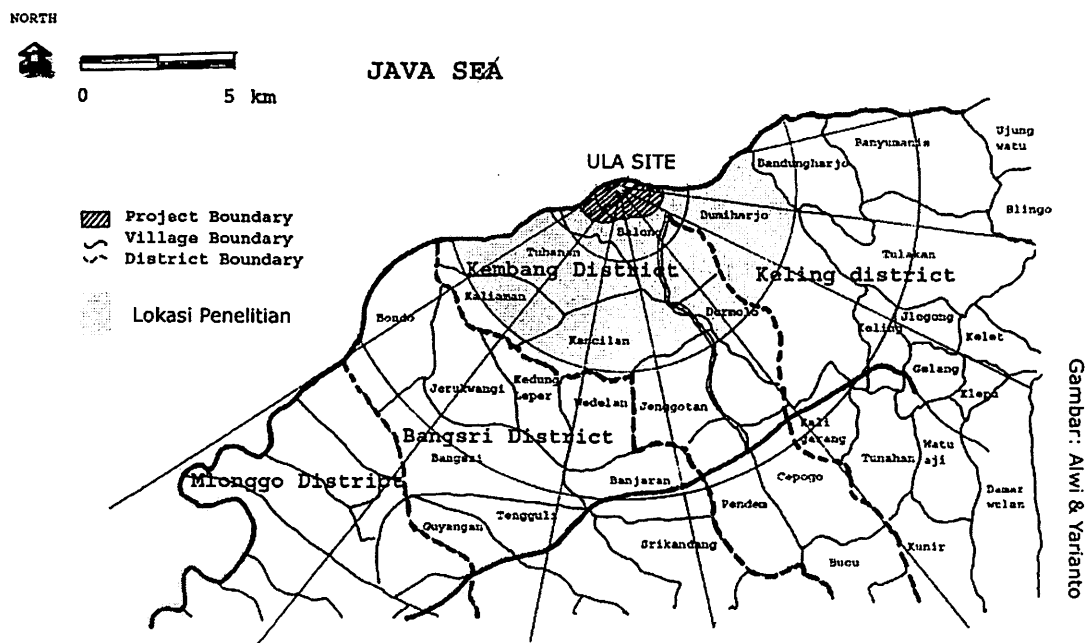
sekalipun melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti (Singarimbun & Efendi, 1984). Penelitian ini bertujuan untuk menyusun gambaran persepsi dan potensi partisipasi masyarakat secara sistematis berdasarkan akurasi dan aktualisasi data. Pola hubungan ini akan dianalisis, untuk mengetahui tren dan kecenderungan potensi partisipasi masyarakat, serta berbagai upaya/ intervensi yang diperlukan untuk program sosialisasi program PLTN.

Teknik survei dilakukan dengan kuesioner untuk menggali informasi tentang persepsi, budaya, daya beli, dan perilaku masyarakat dalam mensikapi program pembangunan PLTN.

Penentuan sampel dilakukan secara random sampling.

## II.2. Penetapan Sampel dan Lokasi Sampling

Sampel merupakan bagian populasi yang diambil secara acak yang diharapkan dapat mewakili keseluruhan populasi. Sampel diambil sebesar 241 responden, dan diharapkan dapat menghasilkan potret sosial dan potensi partisipasi masyarakat untuk program PLTN. Daerah penelitian mencakup 6 desa di sekitar tapak PLTN, yaitu Kaliaman, Balong, Dermolo, Kancilan, Bumiharjo, dan Tubanan. Pengambilan responden dengan strata masyarakat awam adalah dengan pertimbangan bahwa mereka adalah yang akan terkena dampak langsung (baik positif maupun negatif). Lokasi sampel seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Gambar: Alwi & Yariantio

### II.3. Teknik Analisis

Analisis data dilakukan baik dengan statistik deskriptif, yang akan menjelaskan berbagai karakteristik data maupun statistik induktif (inferensi) yang diharapkan dapat mengambil suatu kesimpulan (generalisasi) populasi dari data sampel yang diambil selanjutnya dapat dijadikan sebagai masukan kebijakan.

Teknik analisis yang sering digunakan dalam penelitian empirik adalah apabila penelitian berhubungan dengan dua variabel ordinal, maka analisis statistik *Spearman Rank Order* dapat digunakan.

Distribusi frekuensi adalah suatu susunan data (organisasi data) statistik yang menunjukkan berapa banyak hal dalam kategori-kategori atau interval yang berbeda dari data yang dikelompokkan.

Statistik inferensial (parametrik) berfungsi untuk menemukan ciri-ciri statistik tertentu untuk populasi dari suatu sampel yang dipilih secara random. Korelasi tata jenjang Spearman merupakan teknik analisis data untuk mengetahui koefisien korelasi dengan mendasarkan pada perbedaan nomor urut (rangking) dari dua variabel dimana datanya telah tersusun secara berjenjang berurutan.

Pengolahan data dilakukan dengan perangkat lunak SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) yang mencakup perhitungan frekuensi dan korelasi untuk mencari hubungan dua variabel.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### III.1. Profile Responden

#### III.1.1. Desa Penelitian

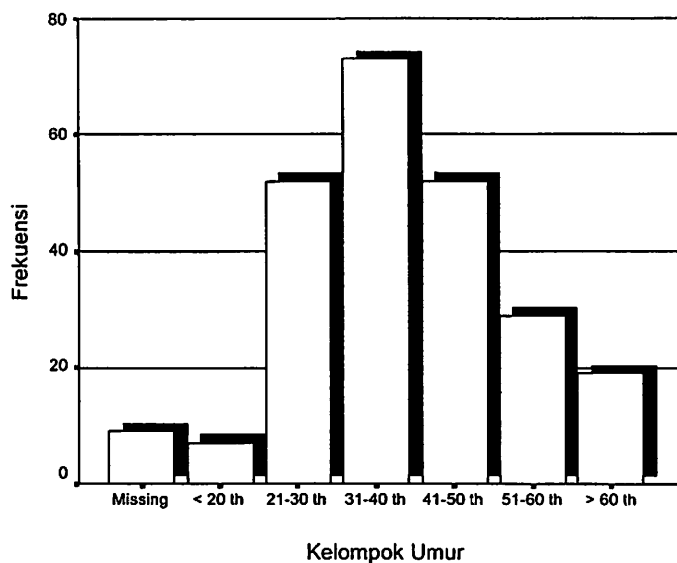
Desa penelitian mencakup Kaliaman, Balong, Dermolo, Kancilan, Bumiharjo, Tubanan. Keseluruhan responden berjumlah 241 dan diambil merata untuk seluruh responden.

Tabel 1. Jumlah Responden di Desa Penelitian

No	Desa	Frekuensi	Persen
1	Kaliaman	39	16,2
2	Balong	40	16,6
3	Dermolo	40	16,6
4	Kancilan	41	17,0
5	Bumiharjo	39	16,2
6	Tubanan	41	17,0
7	Missing	1	,4
8	Total	241	100

### III.1.2. Umur Responden

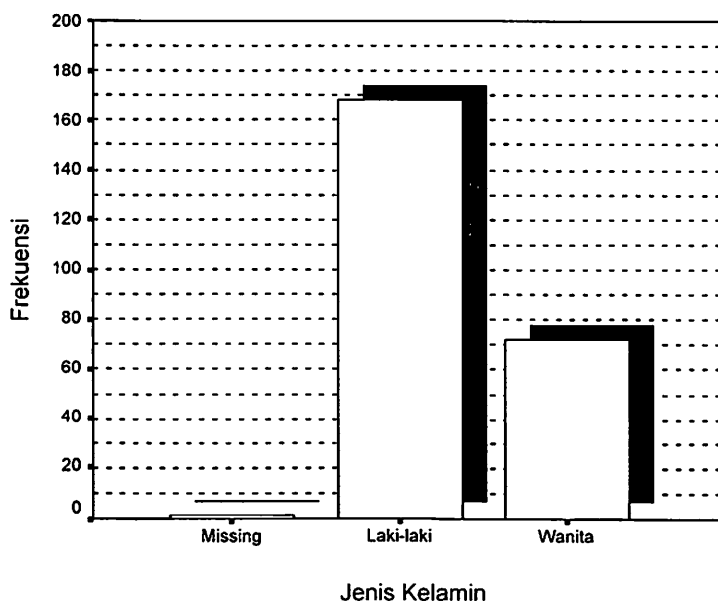
Sebagian besar responden berumur antara 31-40 tahun, dan terdistribusi normal, seperti terlihat pada Gambar 2. Pada umur 30-40 tahun merupakan kelompok sangat produktif, menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial.



Gambar 2. Kelompok Umur Responden

### III.1.3. Jenis Kelamin Responden

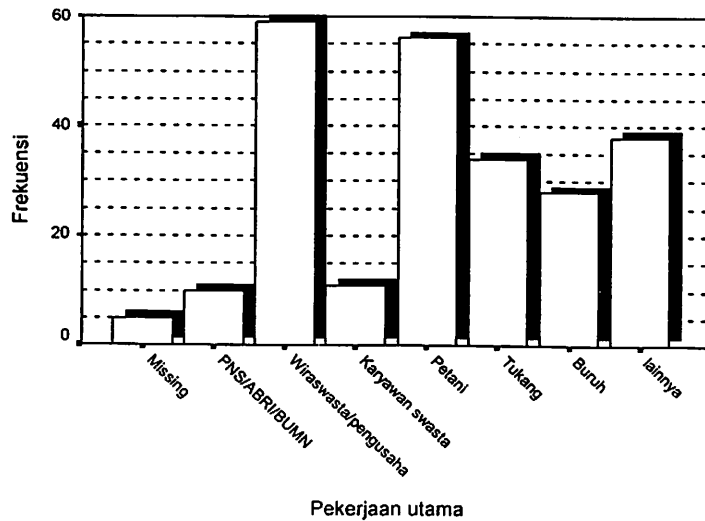
Jumlah responden laki-laki sebanyak 168 (69,7%) dan wanita sebanyak 72 (29,9 %) tidak terisi 1 orang.



Gambar 3. Jenis Kelamin Responden

### III.1.4. Pekerjaan utama responden

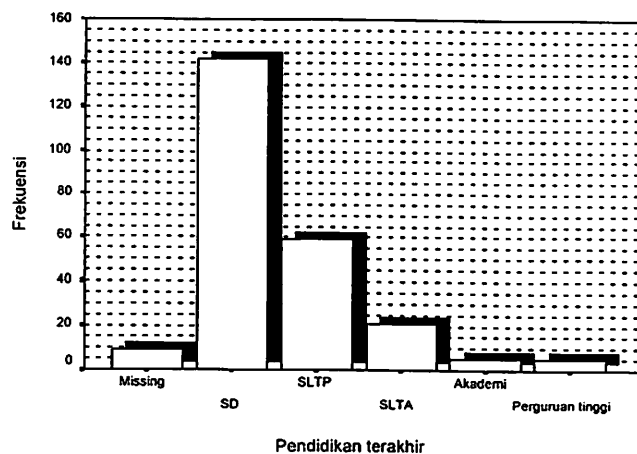
Pekerjaan utama responden yang paling banyak adalah wiraswasta/pengusaha kemudian diikuti petani, pekerjaan lainnya, tukang, buruh, karyawan swasta, PNS/ABRI/POLRI. Responden yang bekerja sebagai pengusaha atau wirswasta terdiri dari pengusaha meubel/ukiran, bengkel mobil dll. Jepara merupakan kota ukir, dan kehidupan ekonomi banyak bergantung pada usaha meubel dan ukiran. Pekerjaan lainnya sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Buruh meliputi buruh usaha meubel, buruh tani, buruh perkebunan, dan buruh bangunan.



Gambar 4. Profil pekerjaan utama responden

### III.1.4. Tingkat pendidikan responden

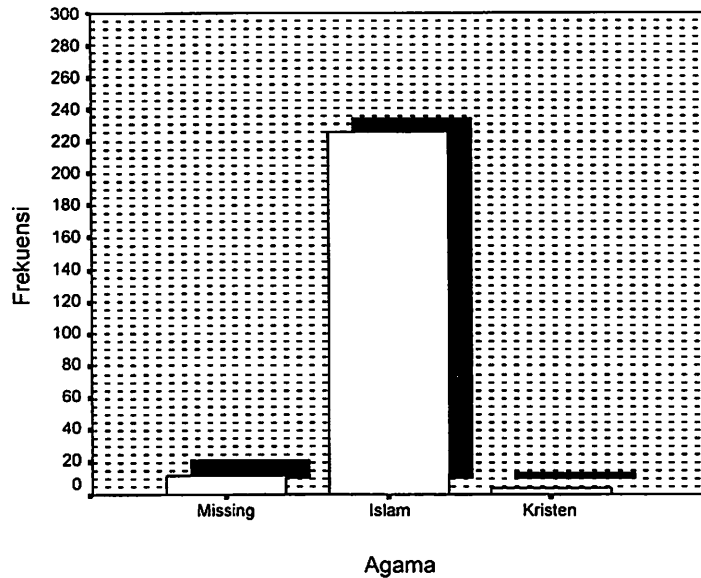
Pendidikan terakhir responden sebagian besar adalah SD (58,9%), kemudian SLTP (24,5%) diikuti SLTA. Ada beberapa responden yang mempunyai gelar sarjana. Hal ini sudah mencerminkan populasi di daerah Jepara, yang sebagian besar masih berpendidikan sangat minim.



Gambar 5. Pendidikan terakhir

### III.1.5. Agama responden

Sebagian besar responden beragama Islam (93,4%), sedangkan 5% tidak terisi. Lainnya beragama Nasrani.



Gambar 6. Agama Responden

### III.1.6. Kepemilikan Barang Konsumsi Listrik

Kepemilikan barang konsumsi listrik merupakan salah satu indikator tingkat konsumsi listrik bagi masyarakat di sekitar tapak PLTN. Seterika listrik dan pesawat televisi sudah merupakan barang yang umum dimiliki oleh masyarakat, sebagian besar masyarakat telah memilikinya (lebih dari 50%). Sedang barang lainnya belum begitu banyak yang memilikinya. Sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan air bersih menggunakan sumur gali yang airnya diambil secara manual. Generator set dimiliki oleh responden yang pekerjaan utamanya adalah pengusaha atau wiraswasta, petani, karyawan swasta dan tukang.

Tabel 2. Kepemilikan barang konsumsi listrik

Status Kepemilikan	Kulkas		Seterika Listrik		Televisi		VCD		Pompa air		Generator Set	
	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%
Punya	38	15,8	153	63,5	176	73	59	24,5	33	13,7	12	5
Tidak punya	186	77,2	75	31,1	52	21,6	164	68,0	188	78,0	207	85,9
Total	224	92,9	228	94,6	228	94,6	223	92,5	221	91,7	219	90,9
Tidak Terisi	17	7,1	13	5,4	13	5,4	18	7,5	20	8,3	22	9,1
Total	241	100	241	100	241	100	241	100	241	100	241	100



Tabel 3. Hubungan Antara Pekerjaan utama dan Kepemilikan Generator set

Pekerjaan utama	Generator set		Total
	ada	tidak	
PNS/ABRI/BUMN	0	8	8
Wiraswasta/pengusaha	3	47	50
Karyawan swasta	1	10	11
Petani	3	47	50
Tukang	1	30	31
Buruh	0	28	28
Lainnya	4	33	37
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>203</b>	<b>215</b>

Tabel 4. Hubungan Antara Kepemilikan Generator dan Daya Listrik Terpasang

Kepemilikan Generator Set	Daya Listrik Terpasang (Watt)					Total
	0	450	900	1300	> 1300	
ada	-	3	6	1	-	10
tidak	5	139	44	10	1	199
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>142</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>209</b>

Generator tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun untuk kegiatan usaha.

### III.1.7. Kepemilikan Alat Transportasi

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat di sekitar tapak PLTN. Lokasi penelitian yang jaraknya relatif jauh terhadap akses kendaraan umum, serta sudah tersedianya jalan-jalan beraspal, menjadi alasan utama menggunakan sepeda motor yang harganya relatif terjangkau sebagai alternatif alat transportasi keluarga. Bahkan jumlah responden yang memiliki sepeda motor lebih banyak daripada yang memiliki sepeda. Sepeda lambat laun mulai ditinggalkan sebagai alat transportasi.

Tabel 5. Kepemilikan alat transportasi

Status Kepemilikan	Sepeda		Sepeda motor		Mobil		Truk		Pompa air		Generator Set	
	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%
Punya	93	38,6	146	60,6	11	4,6	4	1,7	33	13,7	12	5
Tidak punya	127	52,7	84	34,9	209	86,7	215	89,2	188	78,0	207	85,9
<b>Total</b>	<b>220</b>	<b>91,3</b>	<b>230</b>	<b>95,4</b>	<b>220</b>	<b>91,3</b>	<b>219</b>	<b>90,9</b>	<b>221</b>	<b>91,7</b>	<b>219</b>	<b>90,9</b>
Tidak Terisi	21	8,7	11	4,6	21	8,7	22	9,1	20	8,3	22	9,1
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>100</b>	<b>241</b>	<b>100</b>	<b>241</b>	<b>100</b>	<b>241</b>	<b>100</b>	<b>241</b>	<b>100</b>	<b>241</b>	<b>100</b>

### III.1.8. Daya listrik terpasang

Sebagian besar responden mempunyai listrik terpasang 450 watt kemudian 900 watt. Hanya sedikit yang memasang listrik dengan daya 1300 W atau lebih. Sebagian besar responden menyatakan cukup dengan daya terpasang. Dilihat dari kepemilikan peralatan rumah tangga yang mengkonsumsi listrik, hal ini wajar, karena masih sedikit responden yang memiliki peralatan listrik dengan konsumsi besar (kulkas, pompa listrik dll). Pola konsumsi listrik untuk daerah penelitian masih tergolong rendah. Konsumsi listrik merupakan salah satu indikasi tingkat kemakmuran masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dari sisi penggunaan listrik, standar hidup masyarakat di sekitar tapak PLTN Ujung Lemahabang masih tergolong rendah. Masyarakat belum banyak menikmati fasilitas peralatan rumah tangga yang otomatis atau semi otomatis, yang dapat meningkatkan kenyamanan hidup.

Tabel 6. Hubungan antara Daya Listrik Terpasang dan Cukup Tidaknya Untuk Konsumsi Rumah Tangga

Daya Listrik PLN Terpasang	Cukup/tidak dengan Listrik Terpasang		Total
	Cukup	Kurang	
0 W/ tdk ada	1	-	1
450 W	147	6	153
900 W	50	2	52
1300	11	-	11
> 1300 W	1	-	1
Missing	-	-	23
Total	210	8	241

### III.1.9. Pendapatan dan Jumlah Tanggungan Keluarga

Sebagian besar responden termasuk dalam kategori berpenghasilan rendah (kurang dari Rp. 400.000), kemudian antara Rp. 400.000 sampai Rp. 800.000. Sebagian besar keluarga menanggung antara 3 sampai 5 orang, sehingga pendapatan perkapitanyapun sangat rendah. Kondisi perekonomian yang kurang bagus ini, menurut beberapa interviewer di lapangan, disebabkan antara lain sepihnya industri mebel, karena mengalami kekurangan bahan baku lokal akibat penjarahan. Pada saat penelitian dilakukan, Proyek PLTU Tanjung Jati B sudah mulai ada titik terang untuk dilanjutkan kembali (dengan adanya kunjungan Presiden Megawati). Masyarakat banyak berharap untuk dapat berpartisipasi kembali.

Tabel 7. Tingkat Pendapatan dan Jumlah Tanggungan Keluarga  
(Dalam ribuan Rupiah)

Pendapatan keluarga/bulan	Penghuni dalam keluarga									
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	Total
< 400	5	14	26	36	15	10	-	-	-	106
400 – 800	-	6	13	27	9	6	-	1	-	62
800 – 1.500	-	-	11	13	6	-	-	-	-	30
1.500 – 3.000	1	-	4	-	2	-	1	-	1	9
3.000 – 5.000	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
Total	6	20	54	77	33	16	1	1	1	209

### III.2. Persepsi dan Potensi Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan PLTN

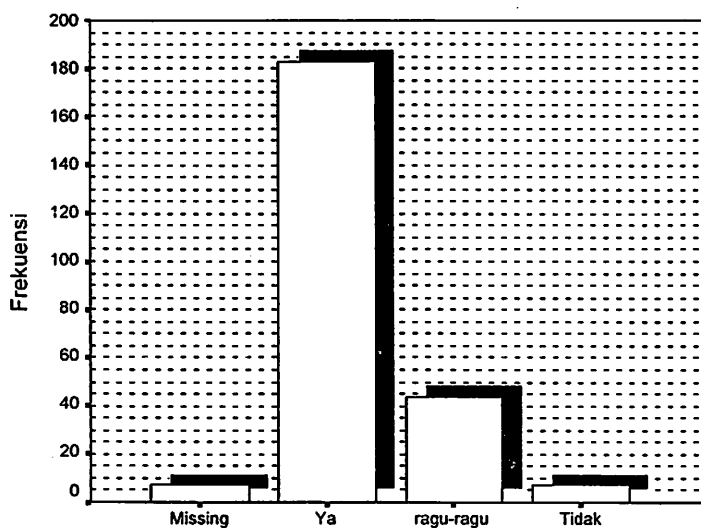
Penerimaan merupakan daya terima masyarakat yang diwujudkan dengan sikap dan tindakan menyepakati, menyetujui, mendukung, dan pada tataran ekstrim adalah tindakan partisipasi secara aktif (E.M. Rogers, 1971). Penerimaan merupakan produk dari proses persepsi atau penafsiran, dan dari pengetahuan yang diperoleh dari proses persepsi itu, akan dijadikan sebagai dasar untuk bertindak, berperilaku, dan beradaptasi. Dalam melakukan proses persepsi, sangat tergantung pada kejernihan individu itu sendiri berupa motif, nilai, keyakinan, tingkat pengetahuan, serta kondisi eksternal. Kejernihan mempersepsi akan dipengaruhi oleh nilai dan manfaat objek baik secara praktis maupun filosofis.

Manfaat praktis berkaitan dengan kegunaan dan nilai produk secara langsung yang dapat dinikmati oleh pengguna (listrik) secara langsung, untuk memenuhi standar hidupnya. Manfaat filosofis berkaitan dengan epistemologi yang melatarbelakangi pembangunan PLTN. Jika terdapat kesepahaman dan kecocokan (dalam arti memperoleh manfaat yang tepat) antara agenda pembangunan PLTN dengan keinginan masyarakat untuk menikmati listrik, maka pembangunan PLTN akan mudah diterima oleh masyarakat. Sebaliknya jika terdapat distorsi diantara agenda keduanya, maka akan terjadi penolakan PLTN.

Peran pemerintah sangat penting untuk proses penerimaan PLTN. Peran tersebut dapat diwujudkan antara lain dengan melakukan intervensi pendidikan publik untuk meningkatkan pengetahuan dan membangun persepsi yang baik. Selain itu kebijakan melalui instrumen ekonomi (misalnya adanya kemitraan usaha, peningkatan infrastruktur ekonomi dll.) akan sangat membantu dalam mempertemukan antara agenda pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat akan mudah menerima program PLTN. Dengan demikian, masyarakat akan menerima kehadiran PLTN secara suka cita, tanpa adanya suatu pemaksaan kehendak dan tekanan. Bahkan untuk tahapan yang lebih jauh lagi, masyarakat dapat menjadi agen pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan PLTN.

### III.2.1. Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PLTN

Sebagian besar masyarakat di sekitar tapak PLTN merasa senang ketika mendengar kembali rencana pembangunan PLTN (ada 183 responden atau 75,9%). Responden yang ragu-ragu ada 44 orang (18,3%). Sedangkan yang menolak hanya 7 responden (2,9%). Selebihnya (7 orang) tidak menjawab. Dalam wawancara terungkap bahwa semula masyarakat sudah skeptis dan menganggap bahwa program PLTN tidak jadi dilaksanakan. Namun begitu mendengar bahwa program PLTN masih tetap ada, mereka mengharapkan sebaiknya dipercepat, dengan harapan dapat memperbaiki perekonomian.



Sikap jika PLTN jadi dibangun (Senang/tidak)

Gambar 7 Sikap Masyarakat jika Rencana Pembangunan PLTN Dipindahkan

Tabel 8. Hubungan antara "keinginan PLTN jadi dibangun " dengan tingkat pendidikan

Pendidikan terakhir	Sikap jika PLTN jadi dibangun			Total
	Ya	ragu-ragu	Tidak	
SD	108	25	5	138
SLTP	47	11	1	59
SLTA	17	3		20
Akademi	4	1		5
Perguruan tinggi	3	1	1	5
Total	179	41	7	227

Korelasi Spearman: -0,017 dan signifikansi 0,803

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS, nilai korelasi spearman antara variabel pendidikan dan variabel "keinginan PLTN akan dibangun" adalah -0,017. Untuk  $n=227$  dan  $r_s = -0,017$ , maka  $t_{hitung} = -0,255$ . Nilai mutlak  $t_{hitung}$  lebih kecil daripada  $t_{tabel}$  untuk semua tingkat kepercayaan (1,65 untuk tingkat kepercayaan 90%, 1,97 untuk tingkat

kepercayaan 95% dan 2,59 untuk tingkat kepercayaan 99%), sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dan keinginan agar PLTN dibangun. Hal ini disebabkan tidak ada kurikulum yang mengajarkan tentang pengetahuan PLTN. Intervensi pendidikan dapat dilakukan dengan memberikan pengajaran pengetahuan PLTN secara berjenjang, disesuaikan dengan tingkat pendidikan.

Tabel 9. Hubungan antara umur dan Sikap jika PLTN jadi dibangun

Kelompok Umur (th)	Sikap Jika PLTN Jadi Dibangun			
	Ya	ragu-ragu	Tidak	Total
< 20	5	2		7
21 - 30	36	15	1	52
31 - 40	55	11	4	70
41 - 50	41	9		50
51 - 60	26	2	1	29
> 60	17	2		19
Total	180	41	6	227

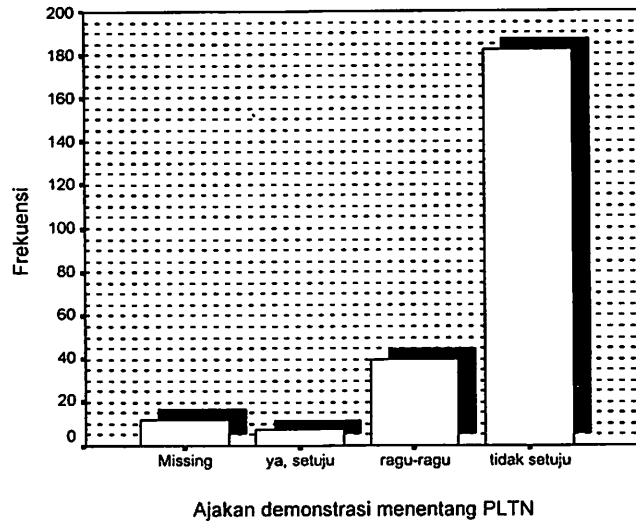
Korelasi Spearman: -0,166 dan signifikansi 0,012

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS, nilai korelasi spearman antara variabel umur dan variabel "keinginan PLTN akan dibangun" adalah -0,166. Untuk  $n=227$  dan  $r_s = -0,166$ , maka  $t_{hitung} = -2,52$ . Nilai mutlak  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  untuk tingkat kepercayaan 95%, ingga dapat disimpulkan ada hubungan antara umur dan keinginan agar PLTN dibangun. Tanda negatif berarti semakin tinggi kelompok umur, semakin mantab dalam bersikap menerima PLTN. Keeratan hubungan dapat dilihat pada nilai signifikan (=0.012) yang lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut sangat kuat.

### III.2.2. Sikap terhadap ajakan demonstrasi menentang PLTN

Banyaknya kepentingan yang didukung oleh situasi politik yang semakin terbuka, membuka peluang lebih luas bagi kelompok anti nuklir untuk menyebarluaskan agendanya. Salah satu kegiatan yang sering dipertontonkan adalah melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Kegiatan ini ditujukan untuk menarik simpati masyarakat, sehingga akan terprovokasi oleh ajakan dan agenda mereka. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat mengambil sikap "menolak' jika diajak untuk melakukan demonstrasi menentang PLTN. Dalam wawancara di lapangan terungkap bahwa alasan mereka menolak adalah, karena mereka membutuhkan kehadiran PLTN, tidak mau mengikuti kegiatan yang dianggap "negatif". Dalam kesempatan wawancara tersebut, pewawancara sempat menanyakan "apakah bersedia jika diajak demonstrasi

dan diberi imbalan?”. Mereka sambil berseloroh menjawab “mau” jika memang diberi imbalan yang besar (misalnya sekian juta rupiah), tetapi kalau hanya sedikit tidak mau, karena takut menanggung risikonya. Berdasarkan jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat bersikap mendukung PLTN.



Gambar 8 Sikap Masyarakat Jika Diminta Untuk Demonstrasi Anti PLTN

### III.2.3. Harapan jika PLTN Dibangun

Masyarakat mempunyai agenda tersendiri terhadap rencana pembangunan PLTN. Agenda tersebut antara lain adalah dapat memanfaatkan listrik, dapat bekerja di PLTN, dapat membuka usaha, peningkatan pendapatan, peningkatan sarana jalan, peningkatan sarana olah raga, dan peningkatan sarana pendidikan. Agenda utamanya adalah peningkatan pendapatan dan dapat menikmati listrik secara murah. Mereka berharap, jika ada PLTN desanya akan terang benderang. Selama ini mereka merasakan beban listrik yang terlalu mahal, dan sangat mengharapkan listrik murah dari PLTN. Agenda ini harus diperhatikan dalam perencanaan PLTN.

Tabel 10. Agenda Masyarakat Terhadap Pembangunan PLTN

Sikap	Dapat memanfaatkan listrik		Harapan dapat bekerja di PLTN		Harapan membuka usaha		Peningkatan Pendapatan		Peningkatan Sarana Jalan		Peningkatan sarana olah raga		Peningkatan Sarana Pendidikan	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Ya	138	57,3	130	53,9	75	31,1	154	63,9	66	27,4	59	24,5	60	24,9
Ragu-ragu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tidak	67	27,8	69	28,6	115	47,7	52	21,6	123	51	129	53,5	132	54,8
Tidak Terisi	36	14,9	42	17,4	51	9,1	52	21,6	20	8,3	53	21,5	48	19,9
Total	241	100	241	100	241	100	241	100	241	100	241	100	241	100

#### III.2.4. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PLTN

Tingkat partisipasi masyarakat diukur dengan melalui beberapa pertanyaan dalam kuesioner, yang menanyakan tentang:

1. Kecemburuan terhadap pendatang. Dalam proyek PLTN diperkirakan akan menyerap banyak tenaga kerja (pada tahapan konstruksi dan operasi). Karena kebutuhan tenaga kerja ini memerlukan SDM dengan spesifikasi tertentu, tenaga kerja dari luar Daerah Jepara pasti tidak dapat dihindari. Adanya pendatang ini, jika tidak dikelola secara baik merupakan sumber konflik yang potensial dengan masyarakat lokal (asli). Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar (205 orang, 85%) responden menyatakan tidak keberatan terhadap pekerja pendatang. Hal ini merupakan nilai positif bagi kepentingan pembangunan PLTN dengan adanya penduduk lokal untuk menerima pendatang. Jepara terkenal sebagai kota industri ukir-ukiran dan meubel, menyebabkan masyarakatnya terbiasa berinteraksi dengan berbagai komunitas masyarakat luar. Hal inilah yang menjadi penyebab keterbukaan sikap masyarakat Jepara. Proses interaksi tersebut yang sudah berjalan lama tentunya merupakan pengalaman empiris, sehingga masyarakatnya berani mengekspresikan pendapatnya dengan keyakinan tinggi bahwa pendatang akan lebih banyak mendatangkan manfaat, daripada merugikan.
2. Mengganggu keamanan dan kenyamanan. Proyek apapun, diperkirakan akan menimbulkan gangguan, baik fisik, sosial maupun lingkungan, terutama pada saat konstruksi. Sebagian besar responden (162 orang, 67%) menyatakan tidak merasa terganggu dengan kegiatan proyek. Hal ini didasarkan pada pengalaman terhadap proyek raksasa yang pernah ada di Jepara (misal Proyek PLTU Tanjung Jati B).
3. Jika proyek PLTN dipindahkan lokasinya. Pertanyaan ini dibuat untuk menyelami keinginan dan pendapat masyarakat secara lebih dalam tentang PLTN. Sengaja pertanyaan ini dibuat dengan memberikan sentimen negatif untuk memancing reaksi spontanitas masyarakat. Ada 126 (52%) responden menyatakan "tidak setuju" jika PLTN dipindahkan ke daerah lain. Rencana pembangunan PLTN sudah sejak lama dicanangkan pemerintah dengan berbagai kegiatan pra pembangunannya, kemudian sempat tidak terdengar gaungnya oleh masyarakat. Masyarakat menganggap "seolah-oleh" PLTN tidak jadi dilanjutkan. Namun mereka masih memendam harapan agar PLTN dapat dilanjutkan, dan jangan dipindahkan ke tempat lain. Mereka beranggapan bahwa adanya proyek PLTN akan meningkatkan kesejahteraan mereka.

4. Menerima segala perubahan. Sebagian masyarakat sudah siap dalam menerima segala konsekuensi (154 responden, 64%) dan segala perubahan akibat pembangunan PLTN. Perubahan tersebut berupa perubahan ekonomi, lingkungan, kehidupan sosial, infrastruktur dan lain-lain. Berbagai kemajuan tentu akan membawa perubahan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Masyarakat telah siap menerima kemajuan tersebut, seperti hasil survei. Sebanyak 200 responden (83%) menyatakan telah siap menerima dan menghadapi kemajuan dalam bentuk apapun. Selain perubahan yang bersifat positif, semua proyek mempunyai dampak negatif. Proyek pembangunan PLTN pun tak terlepas dari dampak negatif, misalnya pada tahapan pra konstruksi diperkirakan akan timbul keresahan masyarakat akibat pembebasan lahan, pada tahap konstruksi akan timbul kebisingan, pencemaran udara, getaran, gangguan kenyamanan dan lain-lain. Pada tahapan operasi, diperkirakan adanya potensi bahaya radiasi pengion. Pada umumnya masyarakat setempat masih belum memahami tentang radiasi. Sebagian diantaranya menyatakan bahwa: "pasti pemerintah sudah memperhitungkan semuanya dan percaya bahwa masyarakat akan aman". Sebagian lainnya mengungkapkan mengenai "kebocoran radiasi" jangan sampai terjadi seperti di Chernobyl". Hasil survei menunjukkan sebagian besar masyarakat tidak atau kurang bersedia menerima dampak negatif (116 orang/48%) dan 61 orang (25%) siap menerima dampak. Oleh karena itu faktor penerimaan dampak ini harus dipertimbangkan dalam perencanaan program PLTN melalui *social setting* atau rekayasa sosial.
5. Bersedia melepaskan lahan. Persoalan pembebasan lahan sering menjadi awal munculnya konflik dari suatu proyek. Terjadinya proses jual beli yang tidak menghasilkan *win-win solution* seringkali mengakibatkan kakacauan sosial (*social riot*) yang diekspresikan dengan unjuk rasa, pembangkangan sosial, perusakan fisik, dan tindakan anarki lainnya. Proses pembebasan lahan merupakan kegiatan yang sangat sensitif, karena selalu akan memunculkan/mengundang berbagai pihak untuk ikut campur dan memanfaatkan situasi tersebut baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Oleh karena itu perlu diketahui kondisi awal masyarakat bersedia atau tidak dilakukan pembebasan lahan, jika terkena proyek. Sebagian responden (169 orang atau 70%) bersedia melepaskan lahannya jika memang terkena proyek (misalnya di lokasi PLTN, atau untuk pelebaran jalan), dengan syarat **harus sesuai dengan harga pasar**. Dalam proses wawancara terungkap bahwa syarat tersebut adalah hal yang mutlak harus dipenuhi oleh pemrakarsa proyek. Hal yang menarik yang perlu diungkapkan dalam penelitian ini adalah temuan tim peneliti terhadap responden yang mempunyai sawah di lokasi tapak PLTN Ujung Lemahabang. Responden

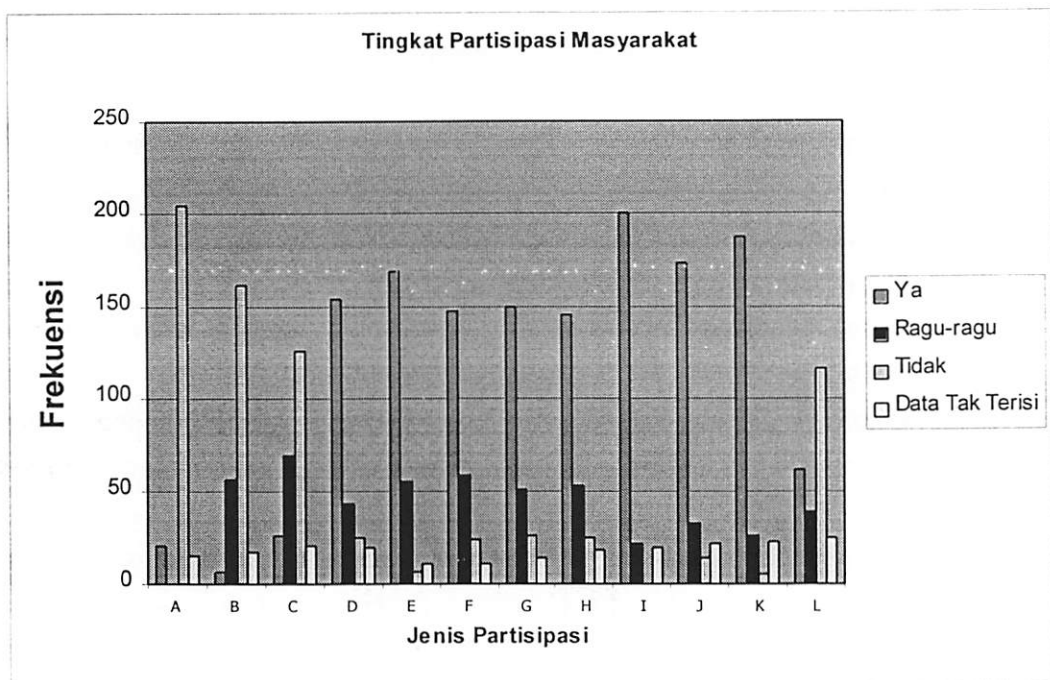


tersebut termasuk berpendidikan tinggi (alumni Teknik Sipil UGM). Dalam *indepth interview*, terungkap bahwa kegiatan proyek agar dapat dipercepat, dan sawah tersebut akan dilepas minimal dengan harga pasar. Dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya masyarakat bersedia melepaskan lahannya dengan harga pasar. Namun sebagai masukan terhadap pemrakarsa, kegiatan pembebasan lahan harus dilakukan secara hati-hati, dan dengan perencanaan matang. Campur tangan berbagai pihak yang ingin memanfaatkan harus diantisipasi sedini mungkin. Selain itu perlu dibuat program pembinaan pasca pembebasan lahan, agar kualitas hidupnya tidak menurun (tidak bertambah miskin). Berbagai pengalaman telah menunjukkan hal demikian.

6. Kesiediaan menjadi anggota forum untuk mensukseskan program PLTN. Untuk mensukseskan program PLTN, maka harus didukung sepenuhnya oleh masyarakat di sekitar tapak PLTN, karena mereka yang akan menerima dampak langsung. Dukungan tersebut tentunya bukan hal yang secara tiba-tiba dapat diraih, namun perlu proses untuk menggalangnya. Oleh karena itu perlu dibentuk forum yang anggotanya adalah masyarakat setempat, untuk mengkondisikan masyarakat setempat agar siap menerima PLTN. Hasil survei menunjukkan bahwa 148 responden (61%) bersedia untuk menjadi anggota forum tersebut. Hal ini merupakan kondisi yang cukup kondusif. Selain menjadi anggota forum, maka kesiediaan untuk ikut menyebarluaskan informasi, merupakan tindakan yang lebih proaktif (partisipatif). Biasanya komunikasi antar anggota komunitas masyarakat (komunikasi horisontal) akan lebih efektif daripada komunikasi secara top down. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat (150 responden, 62%) bersedia untuk membantu ikut meyebar luaskan informasi. Dalam suatu kegiatan proyek, seringkali terjadi berbagai permasalahan yang tidak terduga sebelumnya. Jika terjadi permasalahan yang melibatkan publik, maka publik sendirilah yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil survei, masyarakat menyatakan bersedia untuk memecahkan/membantu memecahkan masalah (245 responden, 60%). Pengelolaan konflik yang paling efektif adalah melibatkan tindakan partisipatif masyarakat.
7. Bersedia menjadi pegawai sesuai dengan tingkat pendidikan. Masyarakat di sekitar PLTN merupakan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja PLTN. Namun tenaga kerja tersebut harus disesuaikan dengan kualifikasinya. Sebanyak 173 responden (72%) menyatakan bersedia untuk menjadi pegawai PLTN baik formal ataupun non formal. Persaingan tenaga kerja, terutama antara pekerja lokal dan pekerja pendatang akan terjadi. Untuk mengantisipasi hal ini haruslah diberi kesadaran masyarakat

tentang kualifikasi tenaga kerja secara proporsional, sehingga tidak menjadi faktor penghambat bagi program PLTN.

8. Kesiapan menerima orang asing. Proyek PLTN diperkirakan akan melibatkan tenaga ahli asing, yang akan berada di lokasi PLTN. Interaksi sosial antara orang asing dan orang lokal (penduduk pribumi) akan menimbulkan gesekan budaya dan infiltrasi budaya. Namun, Jepara sebagai kota industri kerajinan ukir sudah terbiasa berinteraksi dengan orang asing (para pebisnis). Sehingga kehadiran orang asing bukanlah hal yang baru bagi masyarakat setempat. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 187 responden (78%) bersedia menerima kehadiran orang asing



Gambar 8. Potensi Partisipasi Masyarakat

Keterangan

A	Cemburu dg pendatang	G	Bersedia menyebarluaskan informasi PLTN
B	Mengganggu keamanan & Kenyamanan	H	Bersedia aktif menyelesaikan masalah
C	Jika PLTN dipindah	I	Bersedia menerima kemajuan
D	Menerima segala perubahan	J	Bersedia direkrut sesuai pddkn
E	Bersedia melepaskan lahan	K	Bersedia menerima orang asing
F	Bersedia menjadi anggota forum sukses PLTN	L	Bersedia menerima dampak

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan dan konsumsi listrik yang masih rendah.
2. Sebagian masyarakat menyatakan setuju dan siap menerima kehadiran PLTN di daerahnya
3. Agenda masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN adalah: dapat memanfaatkan listrik, dapat ikut bekerja baik sektor formal maupun non formal, dapat membuka usaha, meningkatkan pendapatan, peningkatan sarana jalan, peningkatan sarana olah raga dan sarana pendidikan, dan percepatan pembangunan PLTN
4. Potensi partisipasi masyarakat cukup besar, antara lain kesediaan pembebasan lahan, siap menerima pendatang dan orang asing, keberatan jika PLTN dipindahkan di tempat lain, bersedia secara proaktif dalam forum untuk mensukseskan PLTN penyebarluasan informasi dan penyelesaian masalah publik berkaitan rencana pembangunan PLTN, siap menerima perubahan baik kemajuan maupun dampak.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

1. Singgih Santoso, SPSS Versi 10, Mengolah Data Statistik Secara Profesional, PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2003.
2. Djarwanto dan Pangestu S., Statistik Induktif, Edisi IV, BPFE, Yogyakarta, 1996.
3. Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta LP3ES, 1982